

MOOC PPPK
Massive Open Online Course
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Tahun 2023

J U R N A L



Nama : **HERLINA, A.**
NIP : **19680708**
Golongan : **202221 2**
Jabatan : **042**
Unit Organisasi : **IX**
Ahli Pertama – Guru Kelas
SD Negeri 1 Gempol

KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

TUGAS RESUME AGENDA 1 WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA

WAWASAN KEBANGSAAN

ASN yang professional bebas intervensi politik, bersih dari KKN, mampu melayani dan menjadi perekat masyarakat sesuai UUD 1945 diperlukan guna mencapai tujuan nasional.

Setiap ASN harus mengutamakan kepentingan negara seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah pergerakan kebangsaan perlu secara lengkap diketahui oleh setiap CPNS sehingga dapat menjadi landasan dalam memahami wawasan kebangsaan secara komprehensif.

Tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 tahun 1959. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatarbelakangi terbentuknya organisasi Boedi Oetomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia (STOVIA)

Oktober 1908, kongres pertama Boedi Oetomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*) Yogyakarta dipimpin oleh Wahidin Soedirohoesodo. Anggota Boedi Oetomo berkembang dengan pesat. Pada September 1909, anggota Boedi Oetomo mencapai + 10.000 orang. Kongres terakhir Boedi Oetomo tercatat pada bulan Agustus 1912 yang kemudian memilih Pangeran Ario Noto Dirodjo sebagai ketua.

Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatarbelakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di *Indonesische Clubgebouw*. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di *Vrijmetselaarsloge*. M.Yamin menyampaikan sebuah resolusi berupa 3 (tiga) klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda.

Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian tugasnya dilanjutkan oleh PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI diawali dengan menyerah Jepang kepada Tentara Sekutu. Indonesia sendiri resmi merdeka pada 17 Agustus 1945, dengan dibacakannya teks proklamasi pukul 10.00 di muka rakyat di Jl. Pegangsaan Timur 56.4 (empat) Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara

NILAI-NILAI BELA NEGARA

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

ANALISIS ISU KONTEMPORER

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan.

1. Konsep Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia.

Berdasarkan Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu:

- a. Melaksanakan kebijakan public yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- b. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Menghadapi hal tersebut PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan (inovasi) dalam melaksanakan pelayanan kepada masya PNS bisa menunjukan peranannya dalam koridor peraturan perundang- undangan (bending the rules), namun tidak boleh melanggarnya (breaking the rules). Sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi terutama untuk mengembangkan PNS menjadi pegawai yang transformasional, artinya PNS bersedia mengembangkan cita-cita dan berperilaku yang bisa diteladani, menggugah semangat serta mengembangkan makna dan tantangan bagi dirinya, merangsang dan mengeluarkan

keaktivitas dan berupaya melakukan inovasi, menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif, dan mau membantu orang lain.

2. Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (PERRON, N.C., 2017) ada empat level yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing yakni :

- a. Individu
- b. Keluarga
- c. Masyarakat pada level local dan regional
- d. Nasional
- e. Dunia.

3. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

Modal insani yang dimaksud, disini Istilah modal atau capital dalam konsep modal manusia (human capital concept). Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja

4. Isu-isu Strategis Kontemporer

Saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran

5. Teknik Analisis Isu

Secara umum Teknik analisis isu terbagi ke dalam tiga kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu

- a. Isu saat ini (*Current Issue*)
- b. Isu Berkembang
- c. Isu Potensial

TUGAS RESUME AGENDA 2 NILAI – NILAI DASAR PNS

A. BERORIENTASI PELAYANAN

Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menyatakan bahwa visi Reformasi Birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya:

1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
2. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
3. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

Djamaludin Ancok dkk (2014) memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah:

1. Menyapa dan memberi salam
2. Ramah dan senyum manis
3. Cepat dan tepat waktu
4. Mendengar dengan sabar dan aktif
5. Penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan
6. Terangkan apa yang Saudara lakukan
7. Jangan lupa mengucapkan terima kasih
8. Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan
9. Mengingat nama pelanggan.

1. Panduan Perilaku Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dapat diwujudkan dengan :

- 1) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
- 2) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
- 3) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
- 4) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

b. Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan

- 1) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
- 2) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
- 3) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

c. Melakukan Perbaikan Tiada Henti

- 1) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
- 2) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

2. Tantangan Aktualisasi Nilai Berorientasi Pelayanan

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas dan business as usual) agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik

B. AKUNTABEL

Pengertian Akuntabilitas

Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Etika Publik

Etika Publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai (kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.

- Goals (Tujuan)

- Roles (Peran)
- Procedures (Prosedur)
- Relationships (Hubungan)
- Leadership (Kepemimpinan)

C. KOMPETEN

1. Konsepsi Kompetensi

Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi:

- a. Kompetensi Teknis
- b. Kompetensi Manajerial
- c. Kompetensi Sosial Kultural

2. Hak Pengembangan Kompetensi

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Pendekatan Pengembangan Kompetensi

Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non klasikal. Optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non klasikal, diantaranya e-learning, job enrichment dan job enlargement termasuk coaching dan mentoring.

D.HARMONIS

1. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan kebhinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di nusantara disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam Lambang Negara yaitu Bhineka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut.
3. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah,
4. Membangun budaya harmonis tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan bermasyarakat.

E. LOYAL

1. Urgensi Loyalitas ASN

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government),

pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa).

2. Makna Loyal dan Loyalitas

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Loyal dalam *CORE VALUE* ASN

Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku

F. ADAPTIF

Adaptif merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

G.KOLABORATIF

Collaborative Governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

TUGAS RESUME AGENDA 3 MANAGEMEN ASN

A. SMART ASN

1. LITERASI DIGITAL

a. Pengertian Literasi Digital

Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi. Keterjangkauan (affordances) yang dirasakan dari ruang ekspresi ini mendorong produksi, berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual (Barton dan Lee, 2013). Affordance berarti alat yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal baru, berpikir dengan cara baru, mengekspresikan jenis makna baru, membangun jenis hubungan baru dan menjadi tipe orang baru. Affordance dalam literasi digital adalah akses, perangkat, dan platform digital.

Sementara pasangannya yaitu kendala (constraint), mencegah kita dari melakukan hal-hal lain, berpikir dengan cara lain, memiliki jenis lain dari hubungan. Constraint dalam literasi digital bisa meliputi kurangnya infrastruktur, akses, dan minimnya penguatan literasi digital (Jones dan Hafner, 2012).

b. Peta Jalan Literasi Digital

Terdapat tiga pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Masyarakat digital meliputi aktivitas, penggunaan aplikasi, dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Sementara itu, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital.

c. Lingkup Literasi Digital

Dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses internet berdasarkan data dari APJII dan BPS. Identifikasi Target User dan Total Serviceable Market penting untuk menentukan target spesifik program literasi digital. Saat ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 73,7%.

d. Tantangan Kesenjangan Digital

Pada awal mulanya, konsep kesenjangan digital ini berfokus pada kemampuan memiliki (ekonomi) dan mengoperasikan perangkat digital (komputer) dan akses (Internet).

e. Penguatan Literasi Digital

Di Indonesia, sejak lama sudah dilakukan upaya penguatan literasi digital. Pada Kurikulum 2006, mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sempat menjadi bagian penting di bangku sekolah menengah dan atas.

f. Penguatan Literasi Digital

Di Indonesia, sejak lama sudah dilakukan upaya penguatan literasi digital. Pada Kurikulum 2006, mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sempat menjadi bagian penting di bangku sekolah menengah dan atas.

g. Implementasi Literasi Digital

Sejalan dengan perkembangan ICT (Information, Communication and Technology), muncul berbagai model pembelajaran secara daring.

Selanjutnya, muncul pula istilah sekolah berbasis web (web-school). Bermula dari kedua istilah tersebut, munculah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet, seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan elearning (Kuntarto dan Asyhar, 2016). Gerakan Literasi Nasional dalam Materi Pendukung Literasi Digital dari Kemendikbud 2017 (Kemendikbud, 2017) juga telah menggariskan beberapa indikator terkait penguatan literasi digital di basis sekolah, masyarakat dan keluarga.

B. MANAGEMEN ASN

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

1. Peran, Tugas dan Kode Etik ASN antara lain :

- a. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Memberikan Pelayanan Publik yang Profesional dan Berkualitas.
- c. Mempererat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kode Etik ASN : Kode Etik dan Kode Prilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan Kehormatan ASN Perencana, Pelaksana dan Pengawas

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Fungsi Kode Etik ASN

- sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
- Sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,
- Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi.